

ABSTRAKSI

Sengketa dalam permasalahan tanah hak ulayat di kita di sebabkan akibat perbedaan pandangan tentang hak tanah, dimana UUPA menganggap hak tanah masyarakat adat sebagai hak ulayat, yang artinya hak menguasai. Sedangkan masyarakat adat menentang adanya anggapan tersebut, sebab mereka memiliki perasaan hubungan hukumnya dengan sumber daya tanah dan sumber daya alamnya sebagai hak milik kasus-kasus tanah seperti ini banyak terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan. Penuntutan kasus ini tidak mendapat tanggapan yang baik dari pemerintah untuk menghormati hak tanah masyarakat adat.

Konflik kepentingan ini terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan UUPA 1960 yang memiliki perbedaan pandangan dengan masyarakat adat mengenai hak tanah yang meliputi bumi, air ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. UUPA menganggap hak tanah adat sebagai hak ulayat dan masyarakat merasakan sebagai hak milik. Perbedaan pandangan ini menjadi dasar berbagai konflik antara masyarakat adat dengan pihak luar (investor), sehingga menimbulkan kasus-kasus penguasaan hutan, pengurusan sumber daya alam, konsentrasi penguasaan tanah secara besar-besaran kepada perusahaan besar yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat adat di Irian Jaya bahkan menimbulkan kasus pelanggaran hak asasi manusia di tembagapura Irian Jaya.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memberikan wacana bagi para akademisi dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan perundang-undang khususnya UUPA 1960 tentang pengaturan tanah masyarakat adat serta peraturan Menteri Agraria Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Bagaimana perkembangan pengaturan tanah masyarakat adat, serta kepastian hukumnya.

Semoga tesis ini dapat memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya ilmu hukum kenotariatan, dapat memberikan wacana baik akademisi dan masyarakat dalam hal pengelolaan tanah masyarakat adat kepastian hukumnya.